

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. **Wahyuni, Jamaluddin. (2024). “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur”.** Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PKH dirancang bagi mereka yang kurang mampu dalam memenuhi standar hidup rata-rata seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi, namun dengan adanya bantuan tersebut banyak tantangan yang menghambat efektivitas pelaksanaan program tersebut seperti ketergantungan terhadap bantuan dan penggunaan dana yang tidak selalu diarahkan dengan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH). Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi kepada informan sebanyak lima orang. Serta Teknik Analisis Data Model Interaktif yang mencakup pengumpulan data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Keluarga

Harapan (PKH) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur dapat dikategorikan sebagai Efektif.

2. Rif'atul Mahmudah, Ahmad Baihaqi, Jumaidi (2025)“ Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Mihu Kecamatan Juai Kabupaten Balangan”.

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Mihu Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dilatar belakang dengan adanya permasalahan seperti Penelitian ini mengkaji tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan, manfaat, dan mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih rendah, mengakibatkan kurang optimalnya pemanfaatan program dalam membantu keluarga penerima manfaat keluar dari kemiskinan. Selain itu, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PKH dinilai kurang efektif akibat minimnya monitoring yang ketat dan evaluasi berkelanjutan, sehingga sering terjadi ketidaktepatan sasaran. Meskipun PKH memberikan bantuan langsung untuk meringankan beban ekonomi jangka pendek, dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan ekonomi penerima manfaat belum terlihat signifikan, dengan banyak keluarga kembali ke kondisi pra-PKH setelah bantuan berakhir. Hasil Penelitian Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi tingkat kemiskinan di desa Mihu Kecamatan Juai Kabupaten Balangan cukup efektif hal ini dilihat : pertama, Ketepatan dalam penentuan waktu pada indikator pelaksanaan sudah efektif dan untuk ketepatan waktu kurang efektif. Kedua, Ketepatan menentukan pilihan pada indikator pelaksanaan cukup efektif dan untuk tindakan kurang

efektif. Ketiga, ketepatan dalam menentukan tujuan pada indikator gambaran cukup efektif dan pengaruh cukup efektif. Keempat, ketepatan sasaran pada indikator berpikir tidak efektif dan sasaran cukup efektif. Saran untuk pendamping untuk lebih memperhatikan peserta PKH yang dimana peserta PKH harus dibimbing dan diberi edukasi agar pelaksanaan program keluarga harapan bisa tepat sasaran dan berjalan dengan baik. Program keluarga harapan ini akan berjalan dengan baik jika semua pihak yang ikut andil dalam program ini saling bekerja sama demi satu tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu

Penelitian Wahyuni dan Jamaluddin (2025) berfokus pada efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur dengan menggunakan indikator pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan program, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur dapat dikategorikan efektif karena masyarakat penerima manfaat telah memahami program dengan baik, sasaran penerima bantuan dinilai tepat, serta tujuan program dapat tercapai dengan adanya perubahan nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Rif'atul Mahmudah, Ahmad Baihaqi, dan Jumaidi (2025) berfokus pada efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Mihu Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dengan melihat aspek ketepatan waktu, ketepatan menentukan pilihan, ketepatan menentukan tujuan, dan ketepatan

sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) cukup efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, masih ditemukan beberapa kendala seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program, kurang optimalnya pengawasan dan evaluasi, serta masih adanya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian, teori yang digunakan, fokus penelitian, serta permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas program menurut Budiani yang meliputi ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program, serta berfokus pada efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karau Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selain itu, penelitian ini mengkaji permasalahan yang lebih spesifik, yaitu ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, kurangnya sosialisasi penggunaan dana PKH, serta kurang tertibnya administrasi dan pembaruan data penerima bantuan sehingga diperlukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program tersebut.

B. Tinjauan Teoritis

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga. Dalam memperoleh efektivitas tersebut terlebih dahulu kita ketahui pengertian dari efektivitas itu sendiri adapun pengertian efektivitas secara bahasa. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, yang mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawahkan hasil. Jadi

efektivitas adalah keaktifan daya guna adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan yang orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepa dari serangkaian alternatif atau pilihan cara menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya tersebut merupakan adanya efektifitas.

Efektivitas merupakan bagaimana suatu lembaga berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Efektifitas berhubungan dengan terlaksananya semua tugas-tugas pokok, pencapaian tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota.

Berdasarkan Ensiklopedi Umum Administrasi (Mutiarin dan Zainuddin, 2021:95) menyatakan bahwa efektivitas berasal dari kata kerja efektif, berarti terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena mungkin hasil dicapai dengan penghamburan material, juga berupa pikiran, tenaga, waktu maupun benda lainnya.

Kata efektivitas sering diikuti dengan kata efisiensi, dimana kedua kata tersebut sangat berhubungan dengan produktivitas dari suatu tindakan atau hasil yang diinginkan. Suatu yang efektif belum tentu efisien, demikian juga sebaliknya suatu yang efisien belum tentu efektif. Dengan demikian istilah efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar dan sesuai serta dengan cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan efisien adalah hasil dari usaha yang telah dicapai lebih besar dari usaha yang dilakukan.

Menurut Caster I, Bernard (Mutiarin dan Zainudin, 2021:96) efektivitas adalah ‘tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama’.

Menurut Drucker dan Nuruddin (Mutiarin dan Zainudin, 2021:96), menyatakan bahwa efektivitas berarti ‘melakukan sesuatu yang benar atau sejauhmana kita mencapai tujuan’.

Menurut Handoko (Mutiarin dan Zainudin, 2021:96), menyatakan bahwa efektivitas adalah ‘kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan’.

Menurut Komaruddin (Mutiarin dan Zainudin, 2021:96), mengemukakan bahwa efektivitas adalah ‘suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu’.

The Liang Gie (Mutiarin dan Zainudin, 2021:97-98) berpendapat efektivitas merupakan ‘keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana dikehendaki’.

Menurut Hidayat (Mutiarin dan Zainudin, 2021:98), efektivitas adalah ‘suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai’. Dimana makin besar persentasi target yang di capai, makin tinggi efektivitasnya.

Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas diatas, dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang di capai. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan

sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

b. Model-model Pengukuran Efektivitas

Menurut Campbell J,P (Mutiarin dan Zainudin, 2021:96-97),

pengukuran efektivitas secara umum yang paling menonjol adalah:

a. Keberhasilan Program

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan.

b. Keberhasilan Sasaran

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek *output*, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat *output* dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga.

d. Tingkat Input dan Output

Pada efektivitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.

e. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas.

Gibson et.al (Mutiarin dan Zainudin, 2021:98)

menyimpulkan kriteria efektivitas suatu ke kegiatan dalam tiga

indikator yang berdasarkan ada jangka waktu yaitu :

- a. Efektivitas jangka pendek meliputi produksi (*production*), efisien (*efficiency*), dan kepuasan (*satisfaction*);
 - b. Efektivitas jangka menengah meliputi kemampuan
 - c. menyesuaikan diri (*adaptiveness*) dan mengembangkan diri (*development*);
- Efektivitas jangka Panjang : keberlangsungan (*sustainability*).

Menurut Duncan dalam (Erika Dwi Nanda 2024:18),

mengemukakan ukuran efektivitas sebagai berikut:

1) Pencapaian Tujuan

Keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2) Integrasi

Pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3) Adaptasi

Kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Menurut Budiani (Erika Dwi Nanda 2024) bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

1) Ketepatan sasaran program

Masyarakat miskin yang memenuhi salah satu komponen PKH (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial) merupakan sasaran program PKH yang dilaksanakan di Kelurahan Way Dadi.

2) Sosialisasi program

Pelaksana program melaksanakan sosialisasi kepada KPM PKH untuk mendukung keberlangsungan PKH.

3) Tujuan program

Sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan PKH dengan tujuan PKH yakni dalam memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan pendidikan dan Kesehatan.

4) Pemantauan program

Pemantauan PKH setelah berjalannya program perlu dilakukan karena aktivitas yang dilakukan setelah hasil program yang dikeluarkan sebagai bentuk kepedulian kepada KPM serta dapat diketahui apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai atau tidak.

Berdasarkan pendapat Campbell J.P., Gibson et al., Duncan, dan Budiani, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu program atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti keberhasilan program dan sasaran, kepuasan penerima manfaat, efisiensi penggunaan sumber daya, kemampuan beradaptasi, serta keberlanjutan program. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Budiani karena indikator yang dikemukakan, yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program, dinilai paling sesuai untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Dalam pencapaian efektivitas dipengaruhi oleh faktor yang berbeda-beda tergantung pada sifat dan bidang kegiatan atau usaha dalam program tersebut.

Menurut schuler (2019:7) faktor yang mempengaruhi efektivitas antara lain:

- 1) Kualitas pekerjaan yang dilihat dari baik buruknya kinerja pegawai berdasarkan kualitas pekerjaannya. Semakin baik kualitas kinerja pegawai maka semakin baik pula hasil kinerjanya.
- 2) Kerjasama kinerja yang baik dilihat dari kemampuan pegawai dalam menjalin hubungan dengan sesama pegawai dan pemimpin dalam organisasi tersebut.
- 3) Pengetahuan sesuatu yang dimiliki oleh pegawai sebagai syarat menyelesaikan pekerjaan. Pengetahuan yang baik akan menghasilkan peningkatan kinerja baik juga (soft skill).

- 4) Kehadiran dan ketepatan waktu, dalam sebuah instansi/perusahaan kehadiran pegawai secara fisik di tempat kerja akan mempengaruhi keefektivan dalam pekerjaan, pencapaian targer, pelayanan kepada masyarakat, dan ketenangan saat melangsungkan pekerjaan.

Faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas dalam sebuah organisasi menurut Richard M Steers dalam (Wulandari, Hernawaty, dan Selvia 14:2024) adalah sebagai berikut:

- 1) Karasteristik organisasi (struktur dan organisasi).

Penekanan ciri organisasi oleh steers terhadap struktur dan teknologi karena kedua variable tersebut sangat mempengaruhi efektifitass organisasi dengan tingkatan perubahan inovatif pada hubungan interaktif antara anggota organisasi atau hubungan SDM. Produktivitas organisasi akan meningkat sebagai hasil dari berbagai kemajuan structural, seperti peningkatan spesialisasi fungsi, peningkatan ukuran struktur organisasi, dan formalisasi pengambilan keputusan. Efektivitas suatu organisasi akan dipengaruhi juga oleh kemajuan teknologi yang dapat diimplementasikan dengan cara yang lebih produktif dengan memanfaatkan alat-alat baru. Struktur dan teknologi, bila dimanfaatkan secara efektif akan memudahkan organisasi mencapai tujuannya.

- 2) Karasteristik Lingkungan (ketepatan atas keadaan lingkungan).

Lingkungan eksternal dan internal yang saling eksklusif, dicapai oleh karasteristik lingkungan yang terjadi di luar organisasi. Sedangkan lingkungan internal mengacu pada lingkungan tempat kerja.

- 3) Karasteristik pekerjaan (perbedaan sifat pekerjaan).

Lingkungan kerja memiliki pandangan tentang kebutuhan, tujuan, dan kebutuhan yang berbda-beda, setiap individu memiliki pengaruh langsung terhadap rasa ketertarikan pada organisasi dan potensi kerja. Tanpa ada rasa ketertarikan dan prestasi effektivitas tidak akan dapat tercapai.

- 4) Kebijakan dan praktek manajemen.

Kebijakan dan praktik manajemen merupakan penetapan tujuan strategis dalam menentukan dan memanfaatkan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan kerja, komunikasi, prestasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan serta adaptassi dan inovasi organisasi. Hal ini sangat penting bagi manajemen untuk mengarahkan kegiatan kegiatan secara proporsional untuk mencapai tujuan.

2. Kemiskinan dan Kesejahteraan

a. Konsep Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran karena objek kemiskinan adalah manusia sebagai makhluk sosial maka yang dikatakan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Menurut Ali Khomsan dalam (Putri Nur Hikmayanti;2024) salah satu kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya adalah kelompok lemah secara struktural, yaitu baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis. Kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, serta penyandang cacat, adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan. Mereka seringkali kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang malas, lemah yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka merupakan akibat adanya diskriminasi pada aspek tertentu."

Menurut Sedarmayanti dalam (Putri Nur Hikmayanti;2024) menyatakan bahwa konsep ketidakberdayaan adalah ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan finansial, ketiadaan pelatihan dan kelegangan fisik. Oleh karena itu, ketidakberdayaan selalu dikaitkan dengan

kemiskinan karena ketidakberdayaan dari sudut pandang ekonomi dapat diartikan sebagai lemah dalam pemenuhan kebutuhan hidup."

Bambang Rustanto dalam (Putri Nur Hikmayanti;2024) berpendapat mengenai konsep dalam kemiskinan yaitu suatu ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum karena kemiskinan adalah keadaan gagal suatu individu dalam pemanfaatan sumber daya dan secara riil dan adil pada sebuah manajemen kebutuhan keuangan keluarga.

Kemiskinan juga menjadi elemen yang berkaitan dengan pembangunan manusia. Dimana kemiskinan menjadi salah satu ukuran penting dalam pembangunan manusia/*human development index* (HDI). Dalam pengertian lain disebutkan oleh John Friedmann, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial meliputi (tidak terbatas pada): modal yang produktif atau *assets* (misalnya tanah, perumahan, peralatan kesehatan dan lain-lain); sumber-sumber keuangan (*income* dan *kredit* yang memadai); organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama partai politik, sindikat koperasi, dan lainlain); *network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barangbarang dan lain-lain; pengetahuan dan keterampilan dan informasi yang berguna karena dalam kemiskinan terdapat ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang dihadapi

oleh seorang individu dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologis.

b. Konsep Kesejahteraan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut BAPPENAS, status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Dimana rumah tangga dikatakan sejahtera apabila proporsi pengeluaran kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok.

Menurut BKKBN Kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi dinamis keluarga dimana terpenuhi semua kebutuhan: fisik materil, mental spiritual dan sosial yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan yang diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang mantap dan matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.

Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas

perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antar anggota, keluarga, masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diartikan sebagai adanya kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup atau standar hidup yang nyaman ditinjau dari sisi perekonomian suatu keluarga

3. Program Keluarga Harapan

a. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan PKH, PKH merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain mendorong KPM untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan dan

kesejahteraan sosial, KPM PKH juga didampingi untuk mendapatkan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi center of excellence dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan pendapat Fidyatun dalam (Erika Dwi Nanda 2024), PKH adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH. PKH dinilai memiliki peran terhadap peningkatan konsumsi dalam keluarga. Melalui penyaluran bantuan tunai secara teratur, PKH membantu meningkatkan daya beli KPM. Hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan konsumsi keluarga, dengan memberikan mereka kemampuan untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut dibuktikan pada penelitian Microsave tahun 2019 yang menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga meningkat lebih tinggi 3,8% dibandingkan konsumsi rumah tangga non-KPM PKH.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia mendefinisikan bahwa PKH sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai PKH di atas, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan miskin di Indonesia.

b. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Sebagai salah satu program yang dibuat oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, PKH mempunyai tujuan untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, tujuan PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan

kesejahteraan keluarga miskin dan rentan di Indonesia. PKH juga bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada keluarga penerima manfaat dengan memberikan bantuan tunai secara teratur dan mendukung akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2, tujuan PKH yaitu:

- 1) Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

Tujuan Program Keluarga Harapan (Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019:25-26) bertujuan untuk :

- 1) Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Berdasarkan uraian mengenai tujuan Program Keluarga Harapan (PKH), baik secara umum, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, maupun Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa PKH merupakan program perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga miskin dan rentan.

Tujuan utama PKH mencakup peningkatan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan. Selain itu, PKH juga berupaya mendorong perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam memanfaatkan layanan dasar, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan inklusi keuangan melalui pengenalan produk dan jasa keuangan formal.

c. Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran PKH (Pedoman Pelaksana PKH (2020:4)) merupakan “Keluarga yang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dikelola oleh pusat data dan informasi (pusdatin), kementerian sosial RI. Keluarga tersebut harus

memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial untuk ditetapkan sebagai KPM PKH”.

Berdasarkan Pasal 3 Permensos No 1 Tahun 2018, sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Sejak tahun 2017, untuk memperbaiki sasaran penerima PKH data awal untuk penerima manfaat PKH diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Pusat Data Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos). Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga atau RTSM, terhitung sejak saat tersebut berubah menjadi berbasis Keluarga atau KPM. Perubahan ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga (yaitu orang tua-ayah, ibu dan anak) memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Karena itu keluarga adalah unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan tiga komponen, yaitu komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen kriteria dengan rincian berikut :

a. Komponen Kesehatan

Kriteria penerima PKH komponen kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu hamil/nifas/menyusui

- 2) Anak Usia Dini Anak usia dini adalah anak dengan rentang usia 0 (nol) hingga 6 (enam) tahun yang belum bersekolah.

b. Komponen Pendidikan

Kriteria penerima PKH komponen pendidikan yakni anak usia sekolah. Anak usia sekolah yang dimaksud adalah seorang anak dengan usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan SD/MI sederajat atau SMP/MTs sederajat, dan SMA/MA sederajat.

c. Komponen Kesejahteraan Sosial

Kriteria penerima PKH komponen kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Lanjut usia Seseorang berusia lanjut atau berusia 60 tahun keatas.
- 2) Penyandang disabilitas berat Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan memenuhi kewajibannya. Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi, atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut Pengurus Keluarga. Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada

perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat digantikan oleh kepala keluarga. Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaannya pada program-program pemerintah lainnya

C. Kerangka Berfikir

Pada Pedoman Umum PKH (2021:26), Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah-tengah masyarakat. Penanggulangan kemiskinan di Indonesia perlu didukung dengan program yang dapat mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin sehingga efektivitas suatu organisasi dapat tercapai. Salah satu program kemiskinan tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan maka akan dibahas tentang Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Karau, Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Latar belakang dan rumusan masalah, maka Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Karau, Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah diukur berdasarkan pada Teori Efektivitas menurut Budiani dalam (Erika Dwi Nanda 2024), yaitu Ketepatan sasaran program, Sosialisasi program, Tujuan program,serta Pemantauan program.

Adapun Kerangka Pemikiran Dalam Penelitian Ini :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

